

Abstrak

PPN (Pertambahan Nilai) ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor – faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh PT. IBH sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai dengan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dimulai pada saat perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam dimana Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pada bulan berikutnya dalam hal dimana Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai. Dilihat dari prosedur Penjualan dan Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan terhadap transaksi penjualan PT. IBH hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari PT. IBH. Pembuatan Faktur Pajak menurut ketentuan Undang – undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1a), dimana Faktur Pajak dibuat pada tanggal saat penyerahan barang atau barang yang sudah dikirim atau dapat juga pada tanggal saat perusahaan menerima uang berkaitan transaksi penjualan yang terjadi.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, Faktur Pajak.